

Model Ekonomi Kreatife berbasis *Collaborative Governance*

Vol 2 Issue 2
(Oktober, 2020)

Ika Septiani¹, Bambang Triono², Khoirurrosyidin³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

Email: Ikaseptian336@gmail.com¹, bambangtri635@gmail.com^{2*},
rosyidin.kh@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

Collaborative; Creative Economy;
Institution

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

Regarding the issue of leadership from the government and stakeholders, this collaboration is carried out as much as possible with the hope that it will produce good results and is also carried out openly or transparently so that it is anticipated that there will be a meeting between stakeholders, and at this stage of collaboration all parties involved from From the beginning to the implementation of this collaboration, they cooperated as well as possible but had not yet reached the perfect stage. It is undeniable that an activity cannot be separated from supporting factors and inhibiting factors that can influence collaborative governance in creating a creative economy in Prajegan Village, such as a factor that supports this activity is the existence of a producer agreement, namely an agreement effort before carrying out this collaboration with the goal is that the activities run as well as possible because of the maintenance of the commitments that have been agreed upon by all parties, the institutional factor, namely the stakeholders or stakeholders involved in this collaborative activity, but it is still not optimal. In addition to supporting factors, of course there are also factors that run as supporters in collaboration, namely insufficient human resources, empowerment or guidance efforts are also needed to improve skills so that the depth of this collaboration activity can be carried out well with good results and of course add more effort. other creative.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2018 by IJGCS



1. Pembahasan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan padat penduduk dimana di wilayah perkotaan lebih banyak penduduk dari desa maka dari itu masyarakat yang berada di wilayah perkotaan memiliki pikiran bersaing lebih kuat untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan mengikuti zaman, sedangkan masyarakat di perdesaan berkarakter khas orang desa yaitu gotong-royong dan masyarakat desa mayoritas tidak mempunyai karakter untuk bersaing dengan masyarakat lainnya untuk memperbaiki taraf kehidupan mengikuti zaman. Karena hal ini pembangunan belum terlaksana dengan rata sempurna sehingga wilayah perdesaan masih tertinggal dengan perkembangan wilayah kota, hal ini menyebabkan terpengaruhnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang

meningkat dimana pengangguran itu sendiri merupakan faktor penghambat kesejahteraan masyarakat (Makarno, Husni, & Suryani, 2017).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tindakan yang mampu membangun ekonomi dengan tetap menggunakan nilai-nilai sosial, pemberdayaan merupakan cara yang bisa dilakukan untuk membantu dan memberi dukungan meningkatkan kepercayaan untuk memutuskan keputusan dan memilih tindakan apa yang ingin mereka lakukan untuk terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan atau bisa disebut pemberdayaan merupakan upaya memaksimalkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Konsep Collaborative Governance merupakan cara alternatif yang di klaim mampu mengatur satu atau lebih lembaga publik yang ikut serta berkolaborasi dengan stakeholder yang berkepentingan non publik dalam upaya mengambil keputusan bersama atau kolektif yang bersifat resmi, tersepakati, mengarah, dan bermusyawarah dengan tujuan melakukan kebijakan dalam mengelola program ataupun aset public (Febrian, 2016). Dalam menciptakan ekonomi kreatif tentunya membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah atau pun pihak luar pemerintah seperti bekerjasama dengan Pemerintahan Desa itu sendiri, Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan adapun pihak swasta yang mampu digandeng oleh Desa Prajegan untuk ikut serta dalam menciptakan program ekonomi kreatif seperti PT. Djarum. Sebelum terciptanya ekonomi kreatif tersebut tentunya mereka mendapat arahan, modal ataupun fasilitas yang mampu menunjang terciptanya dan berjalannya ekonomi kreatif tersebut.

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang diambil adalah Siapa saja yang terlibat dalam program ekonomi kreatif di Desa Prajegan, Bagaimana praktik kolaborasi pada program ekonomi kreatif tersebut, dan Bagaimana dampak dari program ekonomi kreatif tersebut bagi masyarakat Desa Prajegan. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak apa saja yang terlibat dalam program ekonomi kreatif, untuk mengetahui bagaimana praktik kolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan bisnis kreatif yang berada di Desa Prajegan, untuk menganalisis bagaimana dampak dari kegiatan bisnis kreatif tersebut bagi masyarakat Desa Prajegan.

2. Metode

Merupakan bentuk mendapat data atau informasi yang lengkap dan akurat, pembahasan mengenai metode penelitian ini meliputi seperti (Satria & Redhani, 2020) :

Penelitian ini peneliti memakai metode Penelitian Kualitatif yang dilakukan di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mendapat data dengan melakukan proses wawancara yakni mewawancarai informan untuk menanyakan perihal yang berkaitan mengenai permasalahan yang hendak dicari, dan melakukan dokumentasi dengan para narasumber . Dalam hal menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisa oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono yang terdiri 3 macam tahapan yaitu Reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (Suwaryo, Sarwono, & Yuwono, 2020)

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dipilihnya tempat ini karena peneliti beranggapan bahwa Desa Prajegan termasuk desa yang tergolong maju dan memiliki suatu inovasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif yang maju sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana “Collaborative Governance Dalam Menciptakan Ekonomi Kreatif Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.

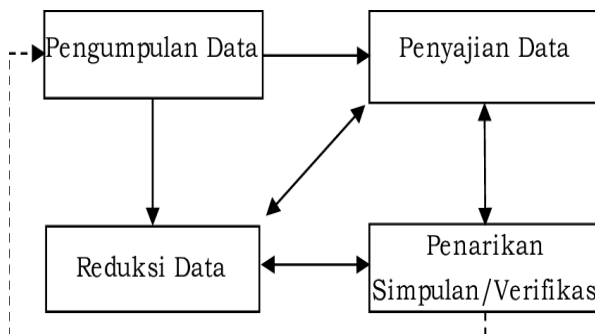
Dalam penentuan informan ini menggunakan teknik purposive sampling yakni dilakukan dengan berdasarkan tujuan dari penelitian itu sendiri. Purposive sampling itu sendiri merupakan teknik pengambilan informan dengan sengaja yang dinilai mampu untuk menyampaikan informasi dan data yang sebenar-benarnya. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Karang Taruna, beberapa masyarakat Desa Prajegan dan alasan mengapa peneliti memilih informan ini dikarenakan peneliti menganggap bahwa informan tadi dianggap memahami permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti nantinya (Syarifudin & Astuti, 2020).

Dalam wawancara ini termasuk metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pendukung untuk penelitian yang dilaksanakan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, dengan cara melakukan perekaman ataupun mencatat data dari arsip-arsip ataupun informasi yang ada kaitannya dengan data penelitian (Sumiasih, 2018).

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang dianalisis dengan cara kualitatif, seperti apapun yang disampaikan informan secara lisan ataupun tertulis serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Analisis Data adalah kegiatan merubah data yang sudah diperoleh yang bertujuan guna menemukan informasi yang bermanfaat yang nantinya bisa memberi petunjuk pengambilan keputusan dengan permasalahan yang diangkat (Erlianti, 2019).

Berikut tahapan dalam menganalisis data :

1. Pengumpulan Data
Kegiatannya yakni menjadikan satu data lokasi penelitian yang dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, disini mulai memilih titik fokus pendalaman data untuk proses penggalian data selanjutnya.
2. Reduksi Data
Proses memilih, mensortir, melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi terhadap data kasar yang ada dilapangan dan diteruskan saat pengumpulan data, maka dari itu reduksi data dapat dilakukan mulai dari peneliti fokus di wilayah penelitian.
3. Penyajian Data
Penyusunan rangkaian informasi setelah itu menyimpulkan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data berbentuk uraian singkat dan perencanaan penelitian selanjutnya.
4. Penarikan Kesimpulan
Dalam pengumpulan data penarikan kesimpulan merupakan menyimpulkan data yang sudah ditampilkan, dan diharapkan menemukan temuan baru yang belum ada ditampilkan sebelumnya (Syarifudin & Astuti, 2020)



Gambar 1. Skema Analisa Data

Sumber : dari (Milles dan Huberman, 1992)

3. Hasil dan Pembahasan

Berikut Bagan tahapan Collaborative Governance dengan pemangku kepentingan :



1. Collaborative Governance di Desa Prajegan ini dalam menciptakan ekonomi kreatif selain dari pihak masyarakat juga melakukan sebuah kolaborasi atau kerja sama dengan berbagai pihak pemerintah seperti UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah (Dispenda), PT. Djarum, PT. Pos Indonesia serta dengan pihak masyarakat. Dalam pembahasan hasil penelitian ini peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* dari (Ansel dan Gash, 2007) dengan penjelasan adalah sebuah pengaturan yang mengatur lebih dari satu lembaga publik secara langsung ikut terlibat dengan stakeholder atau pemangku kepentingan non publik pada saat pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal. Musyawarah, dan berorientasi pada kesepakatan dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik. Kolaborasi itu sendiri punya peran penting dengan harapan menjadikan governance lebih terstruktur sehingga dalam proses pengerjaannya menjadi lebih efektif. Adapun variabel dalam tahapan berkolaborasi, berikut tahapannya yang dijelaskan melalui wawancara dengan informan :

- a. Kondisi Awal

Kondisi Awal merupakan proses diskusi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan membicarakan mengenai potensi yang ada di desa, atau singkatnya baik dari pihak pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta melakukan kerja sama yang di inisiasi pihak pemerintah. dalam asal muasal terciptanya ekonomi kreatif diawali dengan perintah untuk membentuk BUMDesa dan pihak Desa ingin menambah upaya dengan tujuan untuk menambah dan mempertahankan roda perekonomian BUMDesa agar tetap bertahan dan maju, pihak UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah juga datang untuk menawarkan kerjasama dalam usaha pelayanan di BUMDesa Prajegan tapi kami selaku pihak Desa dulu merasa kurang yakin dengan kemampuan desa namun setelah dimusyawarahkan lagi dan semua masyarakat sangat setuju untuk mengambil tawaran kerjasama dengan UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- b. Proses Kelembagaan

Proses Kelembagaan merupakan mengikut sertakan berbagai aktor dari pemerintah maupun bukan dari pemerintah agar terlibat langsung dalam membuat dan mengambil keputusan tentang kebijakan pemerintah dengan tujuan mempermudah dalam memberikan pelayanan publik dan menyediakan serta mengelola aset publik. dalam pembentukan kelembagaan dari pihak Pemerintah Desa mempercayakan dalam merealisasikan dan pengelolaannya di kelola oleh BUMDesa, Koperasi, dan Karang Taruna karena hal tersebut termasuk negosiasi dalam pembagian Job. Dalam collaborative governance masyarakat merupakan stakeholder yang harus memiliki peran dalam tujuan-tujuan dari kolaborasi sesuai yang digambarkan oleh Donhue dalam (Sudarmo,2011) mengenai aspek untuk memulai inisiatif dalam *collaborative governance*.

- c. **Kepemimpinan**
Kepemimpinan merupakan kegiatan mengolah, mengendalikan, dan mengatur keputusan yang ada kaitannya dengan urusan publik. (Ansell dan Gash, 2007) menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan atau stakeholders mempunyai tanggung jawab mengenai hasil dari kebijakan karena kolaborasi itu mempunyai tujuan yaitu mencapai tingkat kesepakatan antara pemangku kepentingan. Intinya kesepakatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi *collaborative governance*. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang sanggup mengatur anggotanya dengan harapan mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan baik.
- d. **Proses Kolaborasi**
Proses kolaborasi merupakan proses dari pengerjaan yang mengikut sertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholders dalam segala tahapan dari pembuatan keputusan. Dalam proses berkolaborasi ini antara pihak pemerintah Desa dan masyarakat tentunya harus saling support dan menjaga sumber daya di Desa nya sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah hasil yang baik dan memuaskan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri untuk kesejahteraan bersama. Dalam pelaksanaan setiap program tentu pihak Desa tidak mungkin mampu untuk berjalan sendiri tentunya dibutuhkan sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak baik dari pemerintah atau pun non pemerintah. Desa Prajegan tentunya sudah melakukan collaborative governance dengan berbagai pihak seperti dengan Dispenda, di bagian “Pelayanan Sumringah” yang dimiliki BUMDesa, masyarakat juga dapat melakukan berbagai transaksi seperti melakukan pembayaran BPJS, pengiriman berbagai barang karena Desa juga bekerja sama dengan pihak PT. Pos Indonesia. Selain itu di Desa Prajegan juga memiliki usaha caffe, pemancingan ikan, toko bunga, irigasi, usaha distro, even organizer, dan ada beberapa lagi usaha yang lain. Desa Prajegan sering melakukan berbagai kerjasama juga dengan pihak non pemerintah, seperti beberapa waktu lalu PT. Djarum mengajak Desa Prajegan untuk mengadakan Event “76 Pasar Heppi” yang dilaksanakan di Lapangan Sumringah Desa Prajegan dimana mereka melakukan berbagai perlombaan yang bisa dimenangkan, mereka juga bisa membeli kupon juga untuk memenangkan undian yang sudah disediakan. Tidak hanya itu Lapangan juga disediakan tempat untuk masyarakat Desa Prajegan melakukan penjualan produk-produknya, jadi selain mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan PT. Djarum tentu Desa juga meraup keuntungan dari penjualan produk dari Desa nya hal yang seperti itu lah termasuk upaya Desa untuk mensejahterakan masyarakatnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Collaborative Governance Dalam Menciptakan Ekonomi Kreatif Di Desa Prajegan, maka dapat disimpulkan bahwa stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat yaitu: Dispenda, PT. Djarum, PT. Pos Indonesia, dan masyarakat Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo itu sendiri. Adapun bentuk tahapan dilaksanakannya praktik Kolaborasi yaitu seperti berikut:

1. Kondisi awal akan dimulainya kegiatan tersebut pihak pemerintah Desa yaitu Bapak Timbul selaku Kepala Desa melakukan mediasi dengan masyarakat menggunakan metode pendekatan emosional terlebih dahulu.
2. Proses kelebihannya adapun dilakukan pembagian tanggung jawab atau job dalam kegiatan ekonomi kreatif dengan tujuan para masyarakat ikut aktif untuk bertanggung jawab kemajuan dari kegiatan ekonomi kreatif tersebut.

3. Kepemimpinan pihak pemerintah dan stakeholders yang melakukan kolaborasi ini dilakukan dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan hasil yang baik dan dilakukan juga dengan terbuka atau transparan sehingga mampu mengantisipasi terdapatnya perselisihan antar stakeholders.
4. Proses kolaborasi ini semua pihak-pihak yang terlibat dari awal sampai terlaksananya kolaborasi ini kompak melakukan kerjasamanya dengan sebaik mungkin namun belum sampai pada tahap yang sempurna. Dengan adanya Collaborative Governance di Desa Prajegan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa seperti sudah terbentuk dan terlaksana ekonomi kreatif seperti terdapatnya Pelayanan sumringah yaitu melayani berbagai layanan contohnya pembayaran pajak kendaraan, pembayaran BPJS, pengiriman barang, dan sebagainya, tidak hanya itu di Desa Prajegan juga ada Caffe dengan pemandangan atau fasilitas pemancingan, distro atau sablon, toko bunga, dan kini Desa sedang dalam tahap pembangunan taman yang nantinya digunakan untuk tempat berbagai event untuk menambah kreativitas dan pendapatan yang mampu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Tidak bisa dipungkiri dalam dilakukan suatu kegiatan tidak bisa lepas dengan perihal faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat yang mampu mempengaruhi collaborative governance dalam menciptakan ekonomi kreatif di Desa Prajegan, seperti faktor yang mendukung kegiatan ini merupakan terdapatnya Kesepakatan produceral yakni suatu upaya membuat kesepakatan sebelum dijalankan kolaborasi ini dengan tujuan agar nantinya kegiatannya berjalan dengan sebaik mungkin karena terjaganya komitmen yang sudah disepakati oleh semua pihak, faktor Intitusi yaitu para stakeholders atau pemangku kepentingan terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini dengan semestinya akan tetapi masih belum maksimal. Selain faktor pendukung tentunya ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi yaitu masalah Sumber Daya Manusia yang belum memadai, diperlukan juga upaya pemberdayaan atau bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan skills sehingga dalam berjalannya kegiatan kolaborasi ini mampu berjalan dengan baik dengan hasil yang baik juga tentu menambah usaha yang lebih kreatif lainnya.

Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

References

- Akbar, A. N. (2021). Collaborative Governance Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Di Kota Makassar. 6.
- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.7>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance In The Development Of Rural Areas (Review of the Draft and Regulation). *Jurnal Kajian Pemerintah*, II, 200–208. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Harmawan, Bagus Nauri Studi, P., Administrasi, I., Administrasi, J. I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Jember, U. (2016). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.

- Makarno, M. K., Husni, M., & Suryani, S. (2017). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.24903/fpb.v1i2.15>
- Satria, B. A., & Redhani, R. (2020). Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(2).
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
- Suwarjo, P. A. W., Sarwono, S., & Yuwono, P. (2020). Peran Muhammadiyah Disaster Management Center Dalam Mitigasi Bencana. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(1).
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1). <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400>
- Triyanto, D., Purnawan, H., & Saputra, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i1.1922>